

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, & Bisri, A. Z., 2006, *Pilkada langsung: problem dan prospek: sketsa singkat perjalanan pilkada 2005*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adji, O.S., 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Budiharjo, M., 1985, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Effendi, M., 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Hamidi, J., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang Pres, Malang.
- Hufron & Hadi, S., 2015, *Ilmu Negara Kontemporer (Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan, dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi, Laksbang Grafika dan Kantor Advokat*” Hufron&Rubaie, Yogyakarta.
- Ayunita, K., & Asman, A. R., 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Muhammad, A., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto & Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manullang, 1973, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pembangunan, Jakarta.

- Marzuki, P. M., 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Rosyada, D., 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.
- Smith *et.al.*, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Tauda, G.A., 2012, *Komisi Negara Independen : Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Waluyo, B., 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Asshiddiqie, J., “*Parpol dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*”. Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 4, Desember 2006.
- Asyandi, M., “*Irasionalitas Persyaratan Pencalonan Perseorangan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah*”, *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 1. No. 1, Juli 2021, Diambil dari <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/5267>
- Bhera, et.al., *Jaringan Politik DPD II Partai Golongan karya Ngada pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kabupaten Ngada*”, *Journal Education and Government Wiyata*, Vol. 3, No. 1, Februari 2025, DOI: <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.216>
- Efriza, *Eksistensi Parpol dalam Persepsi Publik*”, *Jurnal Politica*, Vol. 10, No. 1, Mei 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Faiz, P. M., & Collins, J. S., “*Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi*

- Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Expanding the Authority of Constitutional Question in the Constitutional Court as an Effort for Protecting Citizens' Constitutional Rights)*", Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, Diambil dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3316062
- Femiliona, F., "*Keadilan Pemilu Bagi Calon Perseorangan Kasus Pilkada Sukoharjo 2024*", Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 6, No. 2, Mei 2025, DOI: <https://doi.org/10.46874/v4p83h32>
- Hasibuan, S. A., "*Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi*", Warta Dharmawangsa, Vol. 17, No. 2, April 2023, DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174>
- Isnaini, "*Koalisi Parpol dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia*" Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1, Maret 2020.
- Oga, H & Syamsir, "*Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Regulasi*", Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, DOI: <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8644>
- Prasetyo, Y., "*The Stringent Support Requirements for Independent Candidates in Regional Elections: A Legal Self-Critique of Indonesian Democracy: Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum terhadap Demokrasi*

Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 21, No. 2, Juni 2024, *Journal*

Homepage., <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/>

Pratikno, “*Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol*”,

Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 10, No. 3, Maret 2007.

Frensiska, R., “*Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi*

Terhadap Calon Perseorangan Dalam Perspektif Hak Asasi

Manusia”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum

Nasional, Vol. 4, No. 1, April 2015, Diambil dari

[https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view](https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/50/25)

[/50/25](https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/50/25)

Sitorus, P., “*Calon Presiden Perseorangan Sebagai Perwujudan Aspirasi*

Rakyat Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia”, Sociae Polites,

November 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Tugas Akhir/Karya Ilmiah

Nadhifah, I., 2017, *Politik hukum calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ichsan, A.P., 2021, *Pengaturan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Sihombing, A., 2019, *Rekonstruksi Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Perdana, R.A., 2019, *Eksistensi Calon Perseorangan dalam Pemilukada di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lain-Lain

Basyari, I., “Hari Terakhir, 163 Bakal Calon Perseorangan Belum Penuhi Syarat Dukungan Pemilih”, <https://www.kompas.id/artikel/hari-terakhir-163-bakal-calon-perseorangan-belum-penuhi-syarat-dukungan-pemilih>, diakses 30 September 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/>
Diakses pada 2 Agustus 2025

Komisi Pemilihan Umum, “Perkembangan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024”,

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12628/perkembangan-penetapan-pasangan-calon-kepala-daerah-pada-pilkada-2024>,

diakses 30 September 2025

Calon Independen Sulit Ikut Pilkada DKI Jakarta, Liputan 6, 30 Desember 2011, diakses pada laman

<https://www.liputan6.com/news/read/369882/calon-independen-sulit-ikut-pilkada-dki-jakarta>

Kata Data, “Struktur dan Kelembagaan Parpol di Indonesia”,

<https://katadata.co.id/infografik/5e9a55e4a2423/struktur-dan-kelembagaan-parpol-di-indonesia> diakses pada 7 Agustus 2025.